

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PEMBANGUNAN PELABUHAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL**

Oleh :

Reylea Adrianda Kusuma Putra – 14010111130049

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

**Implementation of the Policy and Public Perception towards the
Construction of Kaliwungu Port in Kendal Area**

Implementation of the development policy of Kaliwungu port in Kendal area is a policy made by the Government stated in the local regulation of Kendal area number 25 of 2007 about the detail layout plan of Kaliwungu port in Kendal area. From this local regulation, the knowledge of the port construction from the society also the purpose and the benefit are absolutely needed. Thus, for the successful development of Kaliwungu port in Kendal area not only depends on the role of the local governments, but it also requires active participations from the local society around the site development or Kendal people as a whole.

This research is both qualitative and quantitative, with the ultimate goal to describe thoroughly the implementation of the development policy of Kaliwungu

port in Kendal area. The data collection technique used in this study are the in depth interviews, the questionnaires that is distributed to some respondents (the local society in Wonorejo village), the documentations and the analysis of documents. The analysis of documents in this study includes the phase of data reduction, data presentation, and data verification or the conclusion.

From the results, it can be concluded that the development policy of Kaliwungu port in Kendal area has been running to its full potential, the Department of Transportation in Kendal area along with related agencies/SKPD have done structuring and monitoring of Kaliwungu port in Kendal area with appropriate procedures, the socialization has also been done by the meeting of coordination between SKPD or directly go to the local society by the related local instruments.

Although there are some shortcomings such as the quantity of human resources that needs to be improved and the commitment from the Central Government related to the operational target of Kaliwungu port. The Local Government in Kendal Area must strive to communicate actively with the Central Government related to the operational permission of Kaliwungu port.

Keyword: Implementation, Port,

PENDAHULUAN

Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan atau wilayah laut, oleh karena itu dikatakan wilayah strategis Indonesia memiliki potensi wilayah laut yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang roda perekonomian bangsa. Pemerintah tidak bisa menganggap wilayah geografis yang ada sebagai hambatan dalam

pemenuhan hak-hak masyarakatnya. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk juga memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Kabupaten Kendal telah membangun pelabuhan dan menetapkan lokasi kawasan pelabuhan melalui peta kesepakatan oleh Bupati Kendal. Namun dalam perjalanannya, janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Kendal pada akhir tahun 2014, hingga kini belum dapat terlaksana. Padahal, sejumlah fasilitas seperti jalan dan penerangan sebagian besar sudah selesai dibangun dan dapat digunakan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang bagaimana implementasi kebijakan pembangunan pelabuhan Kaliwungu di Kabupaten Kendal, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap hal tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak dari pembangunan pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan, implementasi kebijakan, persepsi, partisipasi, dan pembangunan. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Kaliwungu

Pengembangan Jangka Pendek (2005-2010) pelabuhan Kaliwungu meliputi:

a. Kebutuhan akan fasilitas-fasilitas di lingkungan perairan terutama untuk lingkungan perairan pelabuhan penyeberangan. Kebutuhan fasilitas tersebut adalah alur pelayaran, area tempat labuh, area kolam putar dan area pemanduan yang memiliki kedalaman disesuaikan dengan jenis kapal yang ada.

b. Kebutuhan akan adanya dermaga yang mampu melayani kegiatan penyeberangan yaitu dermaga untuk kapal jenis Ro-ro.

c. Penyediaan lahan untuk fasilitas-fasilitas pendukung aktivitas penyeberangan mengingat tanah milik pelabuhan sebagian besar telah ditempati masyarakat.

Sedangkan berikut merupakan sarana prasarana atau infrastruktur fisik yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Pelabuhan Kaliwungu

No	Fasilitas Pelabuhan	Luas/ Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fasilitas Wilayah Daratan			
1	Dermaga Penyeberangan	110 m x 14,5 m	Plengsengan
2	Dermaga Kapal Cepat	8 m x 4,5 m	Ponton
3	Trestle Kapal Cepat	14 m x 2 m	
4	Mooring Dolphin	1 buah	
5	Dermaga Pelabuhan Laut	2.770 m ²	
6	Terminal penumpang	1.285 m ²	
7	Kantor Operasional	250 m ²	
8	Gudang	160 m ²	
9	Kantin	35 m ²	
10	Toilet	10 m ² / 2 unit	
11	Power house	81 m ² / 1 buah	
12	Kantor pelabuhan	700 m ²	
13	Area parkir kendaraan	20.000 m ²	
14	Pos karcis/ Locket	2 buah	
15	Pos keamanan	2 buah	
16	Fasilitas air bersih	5.000 Liter	Sumur artesis
17	Jalan akses	4,2 Km	2 lajur dengan lebar 7 m
Fasilitas Wilayah Perairan			
1	Area alur pelayaran	1.500 m x 90 m	Kedalaman -5 s.d -6 LWS
2	Area labuh kapal	300 m x 500 m	Kedalaman -5 LWS
3	Area tempat putar kapal	10.000 m ²	
4	Breakwater Sisi Barat	1.216 m	
5	Breakwater Sisi Timur	1.392,64 m	
6	Menara suar darat	6 ^o 55'7,81" S 110 ^o 17'10,25" T	
7	Rambu Hijau		Breakwater Sisi Barat
8	Rambu Merah		Breakwater Sisi Timur

Berdasarkan penjelasan pada rencana induk pengembangan pelabuhan jangka pendek, ada dua fasilitas yang belum tersedia. Yaitu, fasilitas pemadam kebakaran dan depot pengisian BBM. Untuk fasilitas pada wilayah perairan sudah tersedia dan siap untuk digunakan.

Penelitian mengenai implementasi pembangunan pelabuhan Kaliwungu merujuk pada model implementasi George C. Edward III, yang terdiri dari empat aspek, sebagai berikut;

Komunikasi, berdasarkan aspek komunikasi yakni adanya sosialisasi aktif dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan pembangunan pelabuhan Kaliwungu. Kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut telah disosialisasikan oleh pemerintah melalui dinas terkait yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dengan berbagai cara baik melalui media massa maupun sosialisasi langsung terhadap masyarakat.

Sumber Daya, berdasarkan aspek sumber daya, terdiri dari sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Dari segi sumberdaya finansial sudah mencukupi implementasi pembangunan pelabuhan kaliwungu, yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Kendal. Sedangkan sumber daya manusia masih kurang, karena sampai sekarang ijin operasional pelabuhan Kaliwungu masih belum ada.

Disposisi, berdasarkan aspek disposisi sudah berjalan baik, adanya komunikasi topdown yang berjalan baik. Hal ini dibuktikan dari tidak ada masalah yang berrati terkait dengan disposisi antara pusat dan daerah. Selain itu juga terdapat komitmen yang kuat dari masing- masing stakeholder dalam melaksanakan tugasnya, hal ini akan membuat proses implementasi menjadi lebih baik.

Struktur Birokrasi, berdasarkan aspek struktur birokrasi, hingga sekarang pemerintah pusat belum mengeluarkan ijin resmi operasional pelabuhan Kaliwungu sehingga menghambat kinerja pemerintah daerah.

2. Persepsi Masyarakat terhadap pembangunan pelabuhan Kaliwungu

Persepsi masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dijelaskan melalui tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan evaluatif. Secara kognitif masyarakat mengetahui tentang adanya pembangunan pelabuhan Kaliwungu. Selanjutnya secara afektif masyarakat belum terlalu merasakan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan pelabuhan Kaliwungu. Hal ini dikarenakan pelabuhan Kaliwungu belum beroperasi secara aktif. Kemudian hasil penelitian persepsi masyarakat Desa Wonorejo secara evaluatif yakni masyarakat setuju atas pembangunan pelabuhan Kaliwungu karena dinilai akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Desa Wonorejo dan kemajuan Kabupaten Kendal dikemudian hari.

3. Tangga Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kasus kebijakan pembangunan pelabuhan Kaliwungu yang dibuat oleh pemerintah, faktanya memenuhi seluruh kriteria tangga partisipasi tingkat informing. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah memberikan informasi tentang adanya kebijakan pembangunan pelabuhan Kaliwungu melalui Perda No.25 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Masyarakat telah berpartisipasi dalam proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah hanya sebatas mendengar aspirasi

masyarakat tanpa feedback yang berarti apabila ada masukan atau pendapat dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan pelabuhan Kaliwungu.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Dalam pembangunan infrastruktur fisik minimal fasilitas pelabuhan, terdapat dua fasilitas yang belum tersedia, yaitu: fasilitas pemadam kebakaran dan depot pengisian BBM. Dalam aspek sumberdaya, pemerintah Kabupaten Kendal terkendala pada ketersediaan sumberdaya manusia guna mendukung beroperasinya pelabuhan Kaliwungu. Sedangkan untuk sumberdaya finansial sampai sejauh ini sudah mencukupi untuk penyediaan infrastruktur pelabuhan. Belum beroperasinya pelabuhan Kaliwungu seperti target yang semestinya dikarenakan belum diterbitkannya surat ijin operasional dari Kementerian Perhubungan. Adapaun target semula pada tahun 2014 pelabuhan ini akan beroperasi, namun selalu mundur dari waktu yang dijanjikan. Sedangkan persepsi dari masyarakat mengenai pembangunan pelabuhan Kaliwungu ini, mereka bisa dikatakan mendukung kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadinya penolakan dari warga sekitar lokasi pembangunan. Dari hasil penelitian juga didapatkan respon positif dari masyarakat sekitar lokasi pelabuhan Kaliwungu. Adapun dampak dari kebijakan pembangunan pelabuhan Kaliwungu ini sendiri masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar ataupun oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan pelabuhan

Kaliwungu ini sendiri masih belum beroperasi sehingga masyarakat merasa belum adanya dampak nyata dari adanya pelabuhan Kaliwungu.

Daftar Pustaka

- Bherata, I Nyoman (1991), *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dr. Umar, Husein, S.E., MBA., M.M (2009), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dr. Nugroho, Riant (2012), *Pubic Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Drs. AG, Subarsono, M.Si, MA (2011), *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Drs. Nasution, M. Nur, M.S.Tr. (2004), *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Feldman, Robert S (2012), *Pengantar Psikologi, Understanding Psychology*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Subarsono, Ab (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, Ph.D (2012), *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah (2009), *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumber Internet

<http://ilearn.unand.ac.id/blog/index.php?entryid=57>, diakses pada 23 Desember 2014, 13:58 WIB

<http://perencanaankota.blogspot.com/2013/11/dampak-dampak-pembangunan.html>

www.wonorejokaliwungu.com, diakses pada 25 Agustus 2015, 23:15 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada 22 Desember 2014, 20:15 WIB.

<http://www.lensaindonesia.com/2012/10/22/pelindo-iii-bangun-polder-sistem-di-pelabuhan-tanjung-emas.html>, diakses pada 22 Desember 2014, 20:30 WIB.

<http://kendalkab.bps.go.id/>, diakses pada 28 Agustus 2015, 21:15 WIB

<http://nadhiamaharany.blogspot.co.id/2014/07/tangga-partisipasi-masyarakat-tingkat.html>, diakses pada 5 Februari 2015, pukul 13:30 WIB

http://www.academia.edu/9839021/Tangga_Partisipasi_Manipulasi, diakses pada 5 Februari 2015, pukul 13:30 WIB